

REFORMASI SOSIAL BUDAYA DALAM UPAYA PEMANTAPAN SUMBER DAYA APARATUR

IAN MARYANA

Balai Diklat Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Kadipaten Kabupaten Majalengka

ABSTRAK

Sistem sosial budaya Indonesia merupakan nilai, tata sosial dan tata perilaku manusia Indonesia yang mampu mewujudkan pandangan hidup dan falsafah Negara Pancasila di segala sudut kehidupan berbangsa dan bernegara. Reformasi sosial-budaya memiliki pengaruh terhadap Pemerintahan yang ada di Indonesia. Di mana Reformasi sosial-budaya terhadap aparatur negara bertujuan untuk mewujudkan sinergitas antara pemerintah, dan masyarakat melalui upaya yang berkelanjutan. Dan upaya untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik itu memerlukan upaya bertahap dengan kurun waktu yang jelas sesuai dengan kondisi, perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat yang secara konsisten harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas dan profesionalitas.

Kata Kunci : *Reformasi, Sosial Budaya, Sumber Daya Aparatur*

I. PENDAHULUAN

Dalam konteks reformasi sosial budaya terhadap SDM, aparatur negara menjadi penting. Reformasi sosial budaya sangat berkaitan dengan semakin menipisnya nilai-nilai etika dan moral budaya yang mengakibatkan terjadinya perilaku dan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai mulia yang seharusnya dijunjung tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai aparatur negara. Tantangan dalam menghadapi lingkungan global menuntut setiap SDM aparatur negara untuk merubah cara pandang sebagai abdi negara agar lebih mampu mengakomodasikan perubahan secara demokratis dan konstitusional, namun dengan tetap menjaga stabilitas dan integrasi nasional.

Dalam kehidupan bernegara, sosial budaya sebagai bagian dalam lingkungan sosial pemerintahan yang paling besar memberikan *impact* bagi kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya suatu negara kemudian akan sangat nampak dari corak pemerintahannya, dengan sosial budaya yang multikultural akibat dari kondisi geografis yang terpisah-pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk negaranya, yakni negara kesatuan. Kemudian dengan masyarakat yang plural mengenai agama, suku, adat istiadat, semuanya sangat berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi sikap toleransi yang kemudian memunculkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”.

Lebih jauh lagi pengaruh kemajemukan budaya tersebut dalam kehidupan pemerintahan kita, yaitu dengan penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom, dengan harapan masing-masing daerah dapat

mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Dengan penerapan asas desentralisasi tersebut, diharapkan seluruh daerah memiliki daya saing tinggi yang sifatnya sehat untuk terus menggali potensinya agar lebih maju, namun tetap dalam kerangka NKRI. Menurut Tavip Agus Rayanto (2009:81), dalam menghadapi globalisasi menuntut setiap SDM aparatur negara untuk merubah cara pandang sebagai abdi negara, untuk lebih mampu mengakomodasikan perubahan secara demokrasi dan konstitusional dengan tetap menjaga stabilitas dan integrasi nasional. Dari sudut pemerintahan peranan aparatur negara menjadi penting, mereka harus mampu bekerja secara lebih profesional, efektif dan akuntabel dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD RI 1945, perlu dibangun aparatur negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Sejalan dengan ketentuan pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa pengelolaan aparatur negara untuk mengasikan pegawai aparatur yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, dan nepotisme.

Indonesia yang memiliki beranekaragam budaya tidak dapat dipisahkan dari budaya yang

telah melekat dalam masyarakat sejak dahulu dan hingga saat ini memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan Pemerintahan, khususnya dalam membentuk budaya kerja dari aparatur negara dalam menjalankan tugas pemerintahan dan masyarakat yang dipimpinnya. Manusia terikat erat dengan lingkungan hidupnya, begitu pula dengan lingkungan pemerintahan yang merupakan bagian terpenting dari sebuah kehidupan karena menentukan kualitas maupun kuantitas pemerintah itu sendiri dalam menjalankan pemerintahan. Budaya tersebut melekat dalam setiap jiwa para aparatur pemerintah yang secara tidak langsung akhirnya akan memengaruhi kinerja serta karakter aparatur dalam menjalankan pemerintahan.

Menurut Alamsyah (2009:70-71), pada tingkat individu dari anggota masyarakat, faktor penyebab utama krisis nasional adalah tererosinya nilai-nilai etika dan moral budaya sehingga telah memungkinkan terjadinya perilaku dan praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai mulia yang diajarkan oleh adat, adab, dan agama seperti: kolusi, korupsi, dan nepotisme dan perkoncoan yang telah sedemikian merajalela sehingga mengakibatkan antara lain runtuhnya sistem perekonomian nasional.

II. KAJIAN TEORITIS

2.1. Konsep Reformasi

Menurut Hidayat (2007:1) Reformasi adalah perbaikan atau perubahan bentuk, sedangkan administrasi berkaitan dengan organisasi dan manajemen pemerintahan yang mencakup seluruh domain kekuasaan negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan demikian, reformasi administrasi adalah perbaikan atau perubahan atas organisasi dan manajemen pemerintahan negara dari bentuk yang berlaku sebelumnya. Montgomery (1960) mendefinisikan reformasi administrasi sebagai suatu proses politik yang didesain untuk menyesuaikan hubungan antara birokrasi dan elemen-elemen lain dalam masyarakat, atau di dalam birokrasi itu sendiri, dengan kenyataan politik.

Menurut Alamsyah (2011: 15), dewasa ini, istilah “reformasi” sudah sedemikian merakyat di negara Indonesia ini, sehingga apa sebenarnya esensi dari reformasi itu menjadi kabur, karena belum adanya konvensi atau kesepakatan untuk tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan istilah tersebut. Lain orang cenderung memakai istilah reformasi dengan arti, maksud, dan tujuan yang berbeda. Istilah reformasi diartikan sebagai upaya secara

sengaja, terencana, dan terprogram untuk mengubah “form” atau bentuk dari sesuatu bentuk yang dianggap lebih baik, atau dikembalikan kepada bentuk asalnya karena alasan-alasan tertentu, misalnya karena bentuk yang ada dinilai sudah menyimpang dari bentuk asalnya. Dengan demikian, pada suatu sistem kenegaraan, seperti sistem administrasi publik, perubahan disebut sebagai reformasi apabila mengandung tiga ciri dasar, yaitu:

- a. Bersifat disengaja, direncanakan, dan diprogramkan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- b. Menyangkut perubahan sistematis, baik mengenai falsafah, struktur fisik, dan struktur manajemen dari sistem tersebut.
- c. Menyangkut perubahan manusia, baik pola pikir, pola sikap, maupun pola tindaknya secara individu, kelompok, ataupun secara organisasi.

2.2. Konsep Budaya dan Kebudayaan

Pada hakikatnya, kebudayaan yang hidup dan melekat pada jiwa suatu bangsa, sudah layak dan sepantasnya menjadi sebuah kebanggaan yang dirasakan dan dimiliki bersama oleh seluruh insan yang bernaung di dalam bangsa itu sendiri. Budaya hadir sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dilestarikan bersama serta sebagai sesuatu yang mempersatukan. Budaya merupakan nilai-nilai kehidupan yang tumbuh dan berkembang di suatu masyarakat. Kebudayaan didefinisikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakannya untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta menjadi landasan bagi tingkah lakunya. Dengan demikian, kebudayaan merupakan serangkaian aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, rencana-rencana dan strategi-strategi yang terdiri atas serangkaian model-model kognitif yang dimiliki oleh manusia dan digunakannya secara selektif dalam menghadapi lingkungannya sebagaimana terwujud dalam tingkah lakunya.

Pengaruh budaya sangat alami dan otomatis, sehingga pengaruhnya terhadap perilaku sering diterima begitu saja. Ketika kita ditanya mengapa kita melakukan sesuatu, maka kita akan menjawab secara spontanitas, “ya karena memang sudah seharusnya begitu”. Jawaban ini berupa jawaban otomatis yang menunjukkan atas pengaruh budaya dalam perilaku sehari-hari. Ketika kita berhadapan dengan masyarakat yang memiliki budaya, nilai dan kepercayaan yang berbeda dengan kita, barulah menyadari bagaimana budaya tersebut telah membentuk perilaku. Kemudian akan muncul apresiasi

terhadap budaya sendiri di saat berhadapan dengan budaya yang berbeda. Davis (1992:46) berpendapat bahwa “orang-orang belajar bergantung pada budaya. Budaya memberikan stabilitas dan jaminan bagi mereka, karena dapat memahami hal-hal yang sedang terjadi dalam masyarakat dan mengetahui cara menggapainya”.

Kemudian kaitan dan pengaruhnya terhadap pemerintahan adalah ternyata budaya dapat memudahkan aparat pemerintah dalam memahami masyarakat yang dipimpinnya. Dengan memahami masyarakat melalui sudut pandang kebudayaannya, maka dapat ditemukan cara-cara atau strategi-strategi yang efektif dan efisien dalam upaya pengelolaan masyarakat untuk membangun hubungan baik antara masyarakat dan pemerintahan yang memiliki tanggung jawab tertentu terhadap masyarakat yang dipimpinnya.

2.3. Sosial Budaya dalam Lingkungan Pemerintahan

Lingkungan sosial pemerintahan terdiri dari semua aspek kehidupan manusia sebagai homo sosial, sebagai *homo politicon*, *homo economic* dan *homo sapiens* di dalam kehidupan bernegara. Semua aspek kehidupan tersebut bukan merupakan unsur yang berdiri sendiri yang lepas dari unsur-unsur lain. Perubahan terhadap unsur yang satu akan berpengaruh terhadap unsur-unsur yang lain. Sosial budaya sebagai bagian dari unsur lingkungan sosial pemerintahan dapat dibagi atas kebudayaan yang sifatnya nonmaterial dan yang sifatnya material.

Kebudayaan yang sifatnya nonmaterial antara lain bahasa, nilai, norma, pengetahuan, pengertian-pengertian dasar yang dihayati oleh masyarakat, dan lain-lain. Sedangkan kebudayaan yang sifatnya material atau fisik ialah benda yang dihasilkan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, misalnya benda yang dihasilkan masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, misalnya jalan raya, rumah, irigasi, dan lain-lain. Lingkungan sosial pemerintahan terdiri atas:

a. Ideologi

Ideologi merupakan salah satu hal yang digolongkan ke dalam lingkungan sosial pemerintahan. Ideologi dalam suatu Negara tentu memberi pengaruh yang sangat besar terhadap corak kehidupan pemerintahan suatu Negara. Sebagai contoh sistem pemerintahan di Indonesia yang sangat mendapat pengaruh dari ideologi Pancasila yang dianut dan diterapkan didalamnya. Dengan

Pancasila yang menjadi ideologi yang dianut dan berlaku diseluruh wilayah Indonesia, maka seluruh aktivitas pemerintahan yang berlaku pun bertumpu pada Pancasila yang menjadi dasar Negara. Sejumlah kebijakan dan pelaksanaannya pun tidak boleh bertentangan dengan nilai – nilai yang diakui dan dijunjung tinggi didalamnya.

b. Politik

Pemerintahan dan politik adalah dua hal yang sangat erat kaitannya, sehingga pembedaannya terkadang sulit dilakukan. Demikian pula dalam hal ini, dapat dipastikan bahwa system politik yang dianut oleh suatu Negara tentu sangat mempengaruhi aktivitas lingkungan pemerintahan didalamnya. Kita lihat saja sistem perpolitikan di Indonesia yang menganut sistem kepartaian dengan multipartai. Kehadiran partai – partai yang semakin menjamur saat ini tentu mengambil pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan pemerintahan yang ada. Kebijakan yang dikeluarkan kemudian selalu lahir dari pertarungan pertentangan kepentingan antar parpol yang ada,. Sehingga parpol yang kemudian “menang” dalam pertarungan tersebut dapat mengambil pengaruh yang paling besar dalam pengeluaran kebijakan dan mendapat kesempatan yang sebesar - besarnya untuk mengakomodasi kepentingan parpol yang memboncenginya.

c. Sosial Budaya

Sosial budaya juga termasuk dalam lingkungan sosial pemerintahan yang paling besar memberikan *impact* bagi kehidupan pemerintahan. Kondisi budaya suatu Negara kemudian akan sangat tampak dari corak pemerintahannya. Misalnya saja di Indonesia, dengan sosial budaya yang multikultural akibat dari kondisi geografis yang terpisah-pisah berbentuk kepulauan sangat berpengaruh pada bentuk Negaranya, yakni Negara kesatuan. Kemudian dengan masyarakat yang plural mengenai agama, semuanya sangat berpengaruh pada iklim pemerintahannya yang menjunjung tinggi sikap toleransi yang kemudian memunculkan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”. Lebih jauh lagi pengaruh kemajemukan budaya tersebut dalam kehidupan pemerintahan kita, yaitu

dengan penerapan system pemerintahan daerah yang otonom, dengan harapan masing - masing daerah dapat mengembangkan segala potensi yang dimilikinya. Dengan penerapan asas desentralisasi tersebut, diharapkan seluruh daerah memiliki daya saing tinggi yang sifatnya sehat untuk terus menggali potensinya agar lebih maju, namun tetap dalam kerangka NKRI.

d. Ekonomi

Sisi ekonomi dan sisi ekologi pemerintahan, merupakan dua ujung tali yang saling tarik menarik antarbagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Kadangkala pemfokusan perhatian pada kebijakan pemerintah mengenai peningkatan taraf ekonomi suatu NEGARA menyebabkan kehidupan ekologisnya terlupakan. Padahal hal yang mungkin tidak diingat bahwa betapapun kemajuan suatu Negara dalam bidang ekonominya, tentu tidak ada nilainya jika sisi ekologisnya rusak akibat eksploitasi besar - besaran dilakukan.

e. Hankam (Pertahanan dan Keamanan)

Bidang hankam merupakan bidang yang tidak bisa dipungkiri memiliki pengaruh yang cukup besar bagi iklim pemerintahan Indonesia. Salah satu syarat suatu negara dapat dikatakan Negara apabila memiliki wilayah. Hal ini kemudian tentu menjadi perhatian oleh pemerintah untuk memperkuat pertahanan keamanan untuk menjaga kedaulatan negaranya. Apabila kita tarik konsep ideal tersebut pada kondisi Indonesia kekinian, maka dapat kita lihat kesenjangan - kesenjangan bidang hankam Indonesia. Dengan kondisi ekologis yang terpisah pulau antar pulau oleh perairan, maka seharusnya kebijakan pemerintahan terkait hankam tersebut lebih mendapat perhatian lagi. Sementara pada saat ini, masalah klaim mengklaim wilayah masih saja terjadi sebagai cerminan masih sangat kurangnya perhatian pemerintah terkait masalah tersebut.

III. PEMBAHASAN

Inti reformasi adalah memelihara segala yang sudah baik dari kinerja bangsa dan negara dimasa lampau, mengoreksi segala kekurangannya, sambil merintis pembaharuan untuk menjawab tantangan masa depan.

Pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara masa lalu memerlukan identifikasi, mana yang masih perlu pertahankan dan mana yang harus diperbaiki. Pancasila yang merupakan lima aksioma yang disarikan dari kehidupan masyarakat Indonesia jelas akan mantap jika diwadahi dalam sistem politik yang demokratis, yang dengan sendirinya menghormati kemajemukan masyarakat Indonesia. Pemilihan umum, salah satu sarana demokrasi yang penting, baru dipandang bebas apabila dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Peranan Pancasila dalam era reformasi harus nampak sebagai paradigma ketatanegaraan, artinya Pancasila menjadi kerangka pikir atau pola pikir bangsa Indonesia, khususnya sebagai Dasar Negara. Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini berarti bahwa setiap gerak langkah bangsa dan negara Indonesia haru selalu dilandasi oleh sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Sebagai negara hukum setiap perbuatan, baik dari warga masyarakat, maupun dari pejabat-pejabat dan jabatan-jabatan harus berdasarkan hukum yang jelas. Jadi hukum yang dibentuk tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Dalam kenyataannya, bangsa Indonesia telah salah mengartikan makna dari sebuah kata Reformasi, yang saat ini menimbulkan gerakan yang mengatasnamakan Reformasi, padahal gerakan tersebut tidak sesuai dengan pengertian dari Reformasi. Contohnya, saat masyarakat hanya bisa menuntut dan melakukan aksi-aksi anarkis yang pada akhirnya terjadilah pengrusakan fasilitas umum, sehingga menimbulkan korban yang tak bersalah. Oleh karena itu dalam melakukan gerakan reformasi, masyarakat harus tahu dan paham akan pengertian dari reformasi itu sendiri, agar proses menjalankan reformasi sesuai dengan tujuan reformasi tersebut.

Pancasila merupakan dasar filsafat negara Indonesia, sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, namun ternyata Pancasila tidak diletakkan pada kedudukan dan fungsinya. Pada masa Orde Lama pelaksanaan negara mengalami penyimpangan dan bahkan bertentangan dengan Pancasila. Presiden seumur hidup yang bersifat diktator. Pada masa Orde Baru, Pancasila hanya sebagai alat politik oleh penguasa. Setiap warga yang tidak mendukung kebijakan penguasa dianggap bertentangan dengan Pancasila. Oleh karena itu, gerakan reformasi harus dimasukkan dalam kerangka Pancasila, sebagai landasan cita-cita dan ideologi negara Indonesia, agar tidak terjadi anarkisme yang menyebabkan hancurnya

bangsa dan negara Indonesia. Setiap sila mempunyai nilai dalam paradigma reformasi, yaitu:

1. Reformasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Artinya, gerakan reformasi berdasarkan pada moralitas ketuhanan dan harus mengarah pada kehidupan yang baik sebagai manusia makhluk tuhan.
2. Reformasi yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, gerakan reformasi berlandaskan pada moral kemanusiaan sebagai upaya penataan kehidupan yang penuh penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
3. Reformasi yang berdasarkan nilai persatuan. Artinya, gerakan reformasi harus menjamin tetap tegaknya negara dan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan.
4. Reformasi yang berakar pada asas kerakyatan. Artinya, seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dapat menempatkan rakyat sebagai subjek dan pemegang kedaulatan.
5. Reformasi yang bertujuan pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya, gerakan reformasi harus memiliki visi yang jelas, yaitu demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Dalam era reformasi akhir-akhir ini, seruan dan tuntutan rakyat terhadap pembaharuan hukum sudah merupakan suatu keharusan karena proses reformasi yang melakukan penataan kembali tidak mungkin dilakukan tanpa melakukan perubahan-perubahan mendasar dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan sosial budaya. Paradigma baru sosial budaya sebagai suatu sistem berkaitan erat dengan sistem hukum, ekonomi, iptek dan sistem politik. Perubahan paradigma sosial budaya antara lain meliputi bidang sosial-budaya, pendidikan, kesehatan dan agama, dalam upaya menciptakan SDM yang berkualitas dan tangguh. Upaya dalam pemecahan masalah sosial-budaya baik jangka pendek maupun jangka panjang, menurut Alamsyah (2009: 78), bertumpu pada prinsip tiga lingkaran konsentris, yaitu *tata nilai, sistem sosial, dan sistem peradaban*. *Tata nilai* adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat bersumber pada ajaran agama, adat istiadat, moral dan etika individu, keluarga, masyarakat dan organisasi. Sedangkan *Sistem Sosial* adalah pranata yang diakui dan dipedomani oleh masyarakat dalam

menyangkut tata hubungan, kelembagaan, budaya/perilaku masyarakat sebagai replika dari tata nilai. Kemudian *Sistem Peradaban* adalah wujud nyata secara fisik yang menggambarkan tata nilai dan sistem sosial yang berlaku dalam bentuk wujud nyata kehidupan sehari-hari, hasil karya seni, teknologi dengan segala realitanya.

Dalam melaksanakan reformasi sosial-budaya bagi SDM aparatur negara dilakukan melalui analisa SWOT. Analisis SWOT Dalam Pendayagunaan Aparatur Negara Dalam Era Globalisasi adalah sebagai berikut:

Kekuatan (Strengths) :

- a) Eksistensi Lembaga Sumber Daya Aparatur di Daerah .
- b) Pelimpahan kewenangan pengelolaan aparatur dari Pusat ke Daerah, sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.
- c) Tersedianya sistem dan prosedur kerja yang baku dalam pengelolaan Sumber Daya Aparatur;
- d) Tersedianya pengelola Sumber Daya Aparatur yang memadai;
- e) Tersedianya Sumber Daya Aparatur yang dikelola;
- f) Tersedianya uraian tugas yang jelas pada masing masing fungsi;
- g) Hasil-hasil pengelolaan Sumber Daya Aparatur yang selama ini telah dilaksanakan.

Kelemahan (Weaknesses):

- a) Belum tersedianya analisa jabatan sebagai dasar perencanaan manajemen SDM;
- b) Belum optimalnya pemberdayaan diklat di masing-masing SKPD
- c) Kurangnya pemahaman proses manajemen pengembangan SDM diindikasikan dengan masih lemahnya koordinasi;
- d) Belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai sebagai pengelola SDM Aparatur.;
- e) Kurang tersedianya sarana dan prasarana diklat yang memadai;
- f) Masih terdapatnya pelanggaran disiplin ASN.

Peluang (Opportunities)

- a) Keputusan MENPAN tentang Penataan ASN;
- b) Keputusan Kepala BKN No. 46 A tentang Standar Kompetensi Jabatan Struktural dan No. 46 B tentang Evaluasi Jabatan;

- c) Tuntutan tentang Standar pelayanan minimal (SPM) dalam Pelayanan Kepegawaian;
- d) Kebijakan kepegawaian secara nasional yang mensyaratkan diklat sebagai bagian sistem pembinaan pegawai;
- e) Banyaknya lembaga pendidikan dan pelatihan lokal maupun nasional yang bisa diajak kerjasama diindikasikan dengan Kerjasama penyelenggaraan Diklat dengan sistem pola kemitraan;
- f) Kerjasama dalam proses pelayanan kepegawaian (pensiun, BPJS, dll);
- g) Banyaknya tawaran peningkatan SDM (diklat fungsional, beasiswa, pendidikan formal);
- h) Makin banyaknya lembaga pengawasan formal dan non formal.

Asumsi Strategi SO:

- a) Penyusunan dan penyempurnaan dalam pengelolaan SDM Aparatur;
- b) Peningkatan koordinasi dengan berbagai sektor dan tingkatan dalam penanganan permasalahan pengelolaan SDM Aparatur;
- c) Pendelegasian sebagian kewenangan pengelolaan SDM aparatur ke unit-unit kerja;
- d) Penyusunan standar kompetensi jabatan dan pelaksanaan uji kompetensi dalam rangka peningkatan penataan pegawai;
- e) Peningkatan *performance* dan kinerja pengelola SDM Aparatur;

Asumsi Strategi WO

- a) Penyusunan SPM Bidang Kepegawaian.
- b) Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi program dengan sektor lain dalam pendayagunaan aparatur;
- c) Percepatan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana SIMPEG yang mampu mendukung kebijakan dalam pengelolaan SDM Aparatur;
- d) Peningkatan akses pegawai terhadap kebijakan dan informasi pengelolaan SDM Aparatur;
- e) Mendorong peningkatan pemanfaatan jasa lembaga kediklatan yang tersedia;
- f) Peningkatan komunikasi dan konsultasi para pihak;
- g) Pelaksanaan analisis jabatan diseluruh unit kerja;
- h) Peningkatan peran pengawasan masyarakat dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai.

IV. PENUTUP

Untuk dapat melaksanakan perubahan-perubahan yang diharapkan tentunya perlu upaya pada tingkat nasional dalam bentuk Reformasi Sosial Budaya. Dengan reformasi sosial budaya, Negara kita memiliki basis yang kuat dalam membangun masa depan yang demokratis, berperikemanusiaan dan beradilan. Paradigma baru sosial budaya sebagai suatu sistem berkaitan erat dengan sistem hukum, ekonomi, iptek dan sistem politik. Perubahan paradigma sosial budaya antara lain meliputi bidang sosial-budaya, pendidikan, kesehatan dan agama, dalam upaya menciptakan SDM yang berkualitas dan tangguh.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, Kamal. 2009. *Reformasi Administrasi Republik Indonesia*. Bandung: Program Magister dan Doktor Ilmu Administrasi Publik, Program Pascasarjana Universitas Pasundan.
- Badeni. 2013. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dwiyanto, Agus. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik, Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hidayat, L. Misbah. 2007. *Reformasi Administrasi: Kajian Komparatif Pemerintahan Tiga Presiden*. Jakarta: Gramedia Pustaka utama.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Gramedia, 1992.
- Mulyadi, Deddy. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan-Publik, Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfa Beta, 2015.
- Pasolong, Harbani. 2014. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rivai, Veithzal. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santosa, Panji. 2012. *Adminstrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung; Refika Aditama.
- Sedarmayanti, 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama.

- Siagian, P. Sondang. 2004. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 1993. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik: Konsep dan perkembangan Ilmu di Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Ubaedillah, A. Dan Abdul Rozak. 2011. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Jakarta - Kencana Prenada Media Grup.
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: Mandar Maju.